



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 30 tahun / Buttu Masa, 20 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kewarga Negara Indonesia, Beralamat di Buttu Masa, RT.001/RW.001, Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Baharuddin, S.H, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Nik 7315070305790005, Pekerjaan Advocat/Pengacara pada Kantor "Posbakum Peradri", No.Induk Advocat 16.2016.00053, Beralamat dan Berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2019 yang telah di daftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 03 /SK/2019 /PA.Prg. . Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, Umur 32 tahun / Benteng, 04 April 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Dahulu Beralamat di Buttu Masa, RT.001 / RW.001, Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Tergugat .

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, 25 Januari 2005 di Malaysia, Berdasarkan Sijil yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia sebagai dasar terbitnya KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 92/02/IV/2005 yang diterbitkan Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Tertanggal 01 Maret 2013, Namun Sijil tersebut telah ditarik pihak KUA Kecamatan Lembang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Sebagaimana layaknya Suami Istri selama 13 Tahun dan bertempat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Negara Malaysia dan di rumah Orang Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniahi 2 (dua) orang keturunan yang bernama:
 - a. ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun /13 Januari 2007 dan Anak tersebut sekarang ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. ██████████ Jenis Kelamin Perempuan, Umur 09 Tahun /18 April 2010 dan Anak tersebut sekarang ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Ikatan Rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya berjalan Rukun dan harmonis, Namun pada Awal Bulan Mei tahun 2018 dalam rumah Tangga Pengugat dan Tergugat mulai diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan Selingkuh dengan Wanita lain bernama ██████████.

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir Bulan Mei tahun 2018 disebabkan karena Penggugat menasehati tergugat untuk berhenti berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat baik dari Penggugat. Tergugat justru pergi bersama selingkuhannya meninggalkan Penggugat dari Rumah Tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan tanpa memberi tahu kemana arah dan tujuannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha kemana-mana mencari Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
9. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 Bulan lamanya, berlangsung sejak Bulan Mei Tahun 2018 sampai sekarang.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat Tergugat tidak Jelas.
11. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga jalan terbaik adalah mengajukan Perceraian;

Berdasarkan alasan Hukum yang telah penggugat uraikan dimuka dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak dipersidangan, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
Terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memebebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/02/IV/2005 yang diterbitkan Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Tertanggal 01 Maret 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 22 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Siara binti Ressa sebagai tante saksi dan Tergugat bernama Suprianto bin Tommi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Malaysia dan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang Pinrang selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbul perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasnawati dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat agar berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;

Saksi 2, ██████████, umur 19 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Siara binti Ressa sebagai tante saksi dan Tergugat bernama Suprianto bin Tommi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Malaysia



dan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang Pinrang selama kurang lebih 13 tahun;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasnawati dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat agar berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasnawati dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat agar berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Januari 2005 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun dengan dikaruniai dua orang anak, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasnawati dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat agar berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dalam waktu tertentu tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasnawati dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat agar berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Mursidin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	296.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

;

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA Prg.